

PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG

Nuri Afika

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jabal Ghafur, Sigli, Aceh
e-mail: ikanuri2004@gmail.com,

ABSTRACT

Community participation is an essential factor in achieving effective and community-oriented village development. However, public participation in village development planning remains constrained by limited understanding of the planning process, low involvement in village meetings, and the dominance of certain groups in decision-making. This study aims to analyze the forms of community participation through community empowerment and to identify the supporting and inhibiting factors affecting participation in Linggong Sagoe Village, Simpang Tiga District, Pidie Regency. This research employed a descriptive qualitative approach using purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that community empowerment enhances public participation in the preparation of village development plans. Supporting factors include the spirit of mutual cooperation, support from the village government, and the availability of village funds. Meanwhile, the main obstacles are limited public knowledge, lack of socialization, time constraints, and the dominance of certain groups. Therefore, continuous community empowerment is necessary to strengthen community participation and ensure that village development planning is more participatory and responsive to community needs.

Keywords: community participation, community empowerment, village development planning.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat di Gampong Linggong Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan gampong. Faktor pendukung meliputi semangat gotong royong, dukungan pemerintah gampong, dan ketersediaan dana gampong. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya sosialisasi, keterbatasan waktu, dan dominasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar perencanaan pembangunan gampong lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, Dan di harapkan Pemerintah gampong diharapkan terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Gampong dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh unsur masyarakat untuk berpartisipasi.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan gampong.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan gampong merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan gampong harus disusun melalui proses perencanaan yang melibatkan masyarakat agar program yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada gampong untuk mengatur dan mengelola pembangunan secara mandiri dengan mengedepankan prinsip partisipatif.

Perencanaan pembangunan gampong idealnya dilakukan secara partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tidak hanya sebatas menghadiri musyawarah, tetapi juga mencakup peran aktif dalam mengidentifikasi masalah, memberikan usulan, menentukan prioritas, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan. Menurut Mardikanto (2017:42), partisipasi masyarakat merupakan inti dari pemberdayaan, sebab melalui partisipasi masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan tanggung jawab dalam menentukan arah pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan gampong sangat penting karena masyarakat lah yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri. Melalui musyawarah gampong, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, menyepakati prioritas pembangunan, serta ikut mengawal jalannya pembangunan agar sesuai dengan kesepakatan bersama. Partisipasi yang kuat akan menghasilkan rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi juga menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap hasil pembangunan sehingga masyarakat

lebih aktif dalam menjaga, merawat, dan memanfaatkan hasil pembangunan gampong.

Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan gampong masih menghadapi berbagai kendala. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat seringkali rendah. Menurut Susanti (2020:115), hambatan utama partisipasi masyarakat antara lain: rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah gampong, dominasi elit lokal yang mendominasi forum musyawarah, serta keterbatasan waktu dan kesempatan masyarakat untuk terlibat. Akibatnya, perencanaan pembangunan yang seharusnya mencerminkan aspirasi masyarakat justru lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas pembangunan gampong yang partisipatif dengan realitas yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, regulasi telah menekankan pentingnya partisipasi, namun di sisi lain implementasinya masih jauh dari harapan. Untuk itu, dibutuhkan strategi pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu meningkatkan kapasitas, kesadaran, serta keberanian dalam menyampaikan aspirasi. Pemberdayaan juga menjadi jalan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah gampong dan masyarakat dalam proses perencanaan.

Fenomena ini juga dapat dilihat pada kondisi Gampong Linggong Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), gampong ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 738 jiwa dengan 137 rumah tangga, dengan mayoritas mata pencaharian penduduk berada pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai gampong dengan

jumlah penduduk relatif kecil, peran partisipasi masyarakat seharusnya lebih mudah terwujud, sebab setiap aspirasi warga dapat lebih mudah ditampung. Namundalam kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan gampong masih belum optimal.

Dalam forum musyawarah gampong, keaktifan masyarakat belum merata. Musyawarah lebih banyak didominasi oleh perangkat gampong, tokoh adat, dan tokoh agama, sementara sebagian masyarakat lainnya cenderung pasif. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain minimnya pengetahuan tentang mekanisme perencanaan, anggapan bahwa pembangunan adalah urusan pemerintah gampong semata, serta kurangnya keberanian masyarakat untuk mengemukakan pendapat. Hal ini berdampak pada belum optimalnya hasil perencanaan, karena tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi.

Padahal, Gampong Linggong Sagoe memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan jika masyarakat dilibatkan secara maksimal. Potensi sumber daya manusia, semangat gotong royong, solidaritas sosial, serta kearifan lokal merupakan modal sosial yang kuat untuk mendukung pembangunan gampong. Selain itu, adanya dana gampong yang dialokasikan setiap tahun memberikan peluang besar bagi gampong untuk mengembangkan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Akan tetapi, jika masyarakat tidak diberdayakan dan tidak berpartisipasi aktif, dana tersebut berisiko digunakan tidak tepat sasaran atau kurang memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting. Pemberdayaan tidak hanya

dimaknai sebagai pemberian kesempatan, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan gampong akan menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas, memperkuat kelembagaan lokal, serta memastikan bahwa pembangunan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong (Studi Kasus di Gampong Linggong Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie).”

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Gampong di Gampong Linggong Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Gampong di Gampong Linggong Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Gampong di Gampong Linggong Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan gampong.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul diatas sebagai berikut:

- 1) Analisis faktor pembangunan desa dalam pengembangan desa mandiri berkelanjutan pada Desa Bunghu Aceh Besar (Lisnawati Dan Lestari, 2019) studi di Desa Bunghu, Aceh Besar tentang faktor pembangunandesamandiri.
- 2) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) (Mulya Lestari Dan Wahyuningsih, 2021) penelitian di Desa Pasi Pinang, Kabupaten Aceh Barat, tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa.
- 3) Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cikembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi (Dewi,2022) meskipun bukan di Aceh, relevan karena membahas hambatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa.

2. METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Gampong di Gampong Linggong Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial berdasarkan kondisi yang terjadi secara alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dandokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari para informan, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penyusunan rencana

pembangunan gampong, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, laporan, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga mampu memberikan gambaran mengenai bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan gampong.

Teknik Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana (2018) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan seluruh data yang telah dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Gampong serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Dalam penyusunan rencana pembangunan gampong, keterlibatan masyarakat menjadi hal sangat penting karena masyarakat

merupakan pihak yang mengetahui secara langsung kondisi, kebutuhan, dan permasalahan yang terjadi di lingkungan gampong. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat diperlukan agar program pembangunan yang disusun dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Linggong Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, diketahui bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan gampong melalui beberapa bentuk kegiatan. Bentuk partisipasi tersebut dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musyawarah gampong, penyampaian usulan pembangunan, keterlibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan, serta keikutsertaan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan samsul bahri selaku keuchik

Gampong Linggong Sago, beliau menjelaskan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dilakukan melalui musyawarah gampong, dimana warga diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan pembangunan secara langsung. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi melalui perangkat gampong.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemerintah gampong memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Musyawarah gampong dijadikan sebagai media komunikasi antara pemerintah gampong dengan masyarakat dalam membahas berbagai kebutuhan pembangunan yang ada di lingkungan gampong.

Dalam kegiatan musyawarah tersebut, masyarakat dari berbagai

kalangan turut dilibatkan, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan perangkat gampong. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah gampong dalam melibatkan masyarakat pada proses pembangunan.

Musyawarah gampong juga menjadi tempat untuk menyatukan berbagai pendapat dan kebutuhan masyarakat. Setiap usulan yang disampaikan masyarakat akan dibahas bersama untuk menentukan program pembangunan yang dianggap paling prioritas. Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak hanya berasal dari pemerintah gampong, tetapi juga berdasarkan hasil kesepakatan bersama masyarakat.

Selain itu, Amiruddin Usman dan Andi Nova menjelaskan bahwa proses penyusunan rencana pembangunan dimulai dari musyawarah dusun yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah gampong. Semua usulan masyarakat yang telah dikumpulkan kemudian dibahas kembali untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah dilibatkan sejak awal dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan gampong karena program yang direncanakan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Linggong Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, diketahui bahwa masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan gampong melalui beberapa bentuk kegiatan. Bentuk partisipasi tersebut dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musyawarah gampong, penyampaian

usulan pembangunan, keterlibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan, serta keikutsertaan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan gampong.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan menunjukkan bahwa pembangunan di Gampong Linggong Sagoe dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi juga ikut terlibat dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah gampong dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih jelas sehingga pembangunan yang dilakukan dapat tepat sasaran.

1) Partisipasi Masyarakat Melalui Musyawarah Gampong

Musyawarah gampong merupakan salah satu sarana utama yang digunakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan gampong. Melalui musyawarah tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pendapat, kritik, saran, maupun kebutuhan pembangunan yang dianggap penting bagi masyarakat.

2) Partisipasi Pemuda dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong

Pemuda juga memiliki peran dalam proses penyusunan rencana pembangunan gampong. Keterlibatan mereka terlihat melalui penyampaian gagasan dan usulan yang berkaitan dengan kegiatan kepemudaan, olahraga, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Keikutsertaan pemuda menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan telah melibatkan berbagai unsur masyarakat. Selain memberikan kontribusi dalam perencanaan, partisipasi pemuda juga menjadi upaya untuk meningkatkan

kepedulian dan tanggung jawab generasi muda terhadap pembangunan gampong.

3) Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan

Masyarakat turut berperan dalam proses pengambilan keputusan melalui forum musyawarah gampong. Berbagai usulan yang disampaikan dibahas bersama untuk menentukan program pembangunan yang menjadi prioritas. Meskipun demikian, tidak seluruh usulan dapat direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggaran gampong. Oleh karena itu, pemerintah gampong menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

4) Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Gampong di Gampong Linggong Sagoe telah berjalan dengan cukup baik. Bentuk partisipasi tersebut tercermin melalui keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah gampong, penyampaian aspirasi, keterlibatan pemuda, serta partisipasi dalam menentukan prioritas pembangunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kerja sama antara pemerintah gampong dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif.

Partisipasi masyarakat memberikan dampak positif terhadap proses perencanaan karena program yang disusun lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan informasi mengenai jadwal musyawarah, kesibukan masyarakat, serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan belum semua usulan dapat direalisasikan.

Meskipun demikian, secara keseluruhan partisipasi masyarakat telah memberikan kontribusi yang cukup baik dalam mendukung penyusunan rencana pembangunan gampong yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

3.2 Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Gampong di Gampong Linggong Sagoe dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

1. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat antara lain peran aktif pemerintah gampong dalam membuka ruang partisipasi masyarakat melalui musyawarah gampong. Pemerintah gampong memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, usulan, dan kebutuhan pembangunan sehingga proses perencanaan menjadi lebih partisipatif.

Musyawarah gampong juga menjadi media yang efektif untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan membangun komunikasi antara pemerintah gampong dengan warga. Melalui forum tersebut, berbagai usulan dibahas bersama untuk menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong. Keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi

dalam setiap tahapan perencanaan. Tingginya kepercayaan masyarakat serta adanya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan gampong.

2. Faktor Penghambat

Meskipun partisipasi masyarakat telah berjalan cukup baik, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pemberdayaan. Hambatan tersebut antara lain rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, kurangnya penyebaran informasi mengenai pelaksanaan musyawarah, serta keterbatasan waktu masyarakat karena aktivitas pekerjaan.

Selain itu, keterbatasan anggaran gampong menyebabkan tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan. Kondisi tersebut terkadang memengaruhi antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas masyarakat, serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah gampong dan masyarakat agar pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Gampong dapat terus ditingkatkan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Melalui Pemberdayaan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong di Gampong Linggong Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Gampong telah terlaksana dengan cukup baik. Keterlibatan masyarakat terlihat

melalui keikutsertaan dalam musyawarah gampong, penyampaian aspirasi, keterlibatan pemuda, serta partisipasi dalam menentukan prioritas program pembangunan. Musyawarah gampong menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran, dan kebutuhan pembangunan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga proses perencanaan dapat berlangsung secara partisipatif.

Penyampaian aspirasi masyarakat menunjukkan adanya kepedulian terhadap pembangunan gampong. Berbagai usulan yang disampaikan menjadi bahan pertimbangan pemerintah gampong dalam menetapkan program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterlibatan pemuda memberikan kontribusi positif melalui ide dan gagasan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, kepemudaan, serta pengembangan masyarakat. Dalam menentukan prioritas pembangunan, masyarakat juga berperan aktif melalui proses musyawarah, meskipun pelaksanaan program tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta tingkat kebutuhan yang menjadi prioritas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat didukung oleh beberapa faktor, yaitu peran aktif pemerintah gampong, pelaksanaan musyawarah yang terbuka, transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah gampong, serta keterlibatan masyarakat dan pemuda dalam proses pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi partisipasi masyarakat, antara lain kesibukan masyarakat yang menyebabkan rendahnya kehadiran dalam musyawarah, kurangnya penyebaran informasi mengenai jadwal pelaksanaan musyawarah, belum terealisasinya seluruh usulan masyarakat karena keterbatasan

anggaran, serta terbatasnya dana pembangunan yang tersedia.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Gampong di Gampong Linggong Sagoe telah berjalan dengan baik. Kerja sama yang terjalin antara pemerintah gampong dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar pemerintah gampong terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Gampong dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh unsur masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Penyebaran informasi mengenai jadwal musyawarah juga perlu ditingkatkan melalui berbagai media komunikasi agar seluruh masyarakat memperoleh informasi secara tepat waktu dan memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong. Pemerintah gampong juga diharapkan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat serta menyesuaikan pelaksanaan program pembangunan dengan kebutuhan yang menjadi prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan, khususnya dalam kegiatan musyawarah gampong, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama. Pemuda juga diharapkan terus memberikan kontribusi melalui ide, inovasi, dan

keterlibatan dalam berbagai kegiatan pembangunan sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan gampong. Di samping itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan perlu terus ditingkatkan agar kemampuan serta kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi semakin berkembang.

Akhirnya, kerja sama antara pemerintah gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan seluruh masyarakat perlu terus diperkuat agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta perencanaan pembangunan gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2019). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aini, N., & Rahman, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 120–132.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. (2018). *Kecamatan Simpang Tiga Dalam Angka 2018*. Sigli: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. (2024). *Kecamatan Simpang Tiga Dalam Angka 2024*. Sigli: BPS Kabupaten Pidie.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). California: SAGE Publications.
- Fauzi, M., & Iskandar, D. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 45–56.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Mardikanto, T. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya..
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, S., & Hidayat, R. (2020). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi

- masyarakat pada pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 95–106.
- Nugroho, A., & Prasetyo, B. (2023). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). *Jurnal Governance*, 9(1), 33–45.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soetomo. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumodiningrat, G. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Gramedia.
- Susanti, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(2), 110–115.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yuliana, R., & Saputra, H. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan partisipatif. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(2), 87–99.